

PROSIDING

SEMINAR HASIL-HASIL PENELITIAN



LEMBAGA PENELITIAN - UNIVERSITAS LAMPUNG

2014



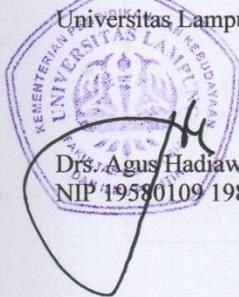
PROSIDING
Seminar Hasil - Hasil Penelitian

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Analisis Daerah Rawan Bencana Sosial Di Kabupaten Tanggamus
Penulis : Dr. Hartoyo, M.Si
Instansi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publikasi : Proseding Seminar Hasil Penelitian
Penerbit : Lembaga Penelitian Universitas Lampung
Nomor ISBN : 978-979-8510-79-3

Bandar Lampung, 2 Februari 2015

Mengetahui,
Dekan FISIP
Universitas Lampung

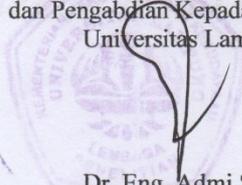


Drs. Agus Hadiawan, M.Si
NIP 19580109 198603 1 002

Penulis,

Dr. Hartoyo, M.Si
19601208 198902 1 001

Menetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lampung



Dr. Eng. Admi Syarif
NIP 19670103 199203 1 003

DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	10.02.2015
NO. INVEN	20/Jan26/81 PL/ 2015
JENIS	Proseding
PARAF	

PROSIDING

Seminar Hasil –Hasil Penelitian



**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
SEPTEMBER
2014**

PROSIDING
Seminar Hasil – Hasil Penelitian

Penyunting :

Dr. Eng. Admi Syarif
Damanhuri Warganegara , S.H., M.H.
Dr. Melya Riniarti
Dr. Sumaryo
Dr. Hartoyo
Dr. Iqbal Hilal, M.Pd.

Penyunting Pelaksana :

Hermansyah, S.H.
Ina Iryana
Irham Arfani

ISBN : 978-979-8510-79-3

Diterbitkan oleh :
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng
Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 705173, Fax (0721) 773798

lemlit.unila.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada civitas akademika Universitas Lampung yang dapat mengenang hari jadinya yang ke 49 tahun di tahun 2014. Dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Lampung menyelenggarakan Seminar Hasil – Hasil Penelitian yang dilaksanakan oleh para dosen dan mahasiswa

Hasil – hasil penelitian yang diseminarkan pada tanggal 29 September 2014 berjumlah 37 makalah yang dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok ilmu-ilmu eksakta dan ilmu-ilmu sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta mendukung pembangunan nasional.

Terimakasih kami sampaikan kepada panitia seminar yang telah bekerja keras untuk mengumpulkan makalah dari para dosen di lingkungan Universitas Lampung dan peran serta aktif dosen dalam seminar. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada dewan penyunting dan penyunting pelaksana yang telah bekerja keras untuk mewujudkan terbitnya prosiding ini, serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, 22 Desember 2014
Ketua,


Dr. Eng. Admi Syarif
NIP.196701031992031003

DAFTAR ISI

1. **RANCANG BANGUN TURBIN AIR UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN DAYA KELUARAN PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO (PLTMH) DI DESA KEBAGUSAN KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN**
AgusSugiri 1
2. **PENGARUH JUMLAH DATA TERHADAP KOEFISIEN S KEWNESS dan KURTOSIS DARI DISTRIBUSI CURAH HUJAN HARIAN MAKSIMUM TAHUNAN**
Ahmad Zakaria.....12
3. **PENGARUH CAHAYA MERAH JAUH (700-735 nm) TERHADAP BERAT SEGAR DAN KANDUNGAN KARBOHIDRAT TERLARUT TOTALBUAH CABAI MERAH (*Capsicum Annum L.*)**
Beti Sudarniyati, Zulkifli, Martha Lulus Lande21
4. **RESPONS PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI CABAI MERAH (*Capsicum annumL.*) TERHADAP PENGGUNAAN MULSA PLASTIK DAN JERAMI DI GISTING KABUPATEN TANGGAMUS**
RA. Diana Widiyastuti.....29
5. **MANAJEMEN SISTEM TATA UDARA PADA GEDUNG REKTORAT UNIVERSITAS LAMPUNG**
AndriDwi S, Endah Komala Sari,Dispriksde Despa, Nining Purwaningsih.....34
6. **HUBUNGAN SPASIAL KEPADATAN PENDUDUK DAN PROPORSI KELUARGA PRASEJAHTERA TERHADAP PREVALENSI TUBERKULOSIS PARU DI BANDAR LAMPUNG**
DyahWulan Sumekar Rengganis Wardani.....44
7. **INFEKSI SALURAN KEMIH NOSOKOMIAL PADA PENDERITA PENGGUNA KATETER DI RS ABDOEL MOELOEK BANDAR LAMPUNG**
EfridaWarganegara ,Ety Apriliana57
8. **PENENTUAN PERIODE PENCAHAYAAN DAN PENAMBAHAN MOLASSES OPTIMUM PADA KULTIVASI *MIXOTROPHICNANNOCHLOROPSIS OCULATA***
Elida Purba dan Manuel Siregar66
9. **PERSPEKTIF DEBIT LINGKUNGAN PADA SKALA MESO MENGGUNAKAN PENDEKATAN HIDROLOGI DI SUNGAI SEKAMPUNG**
Endro P Wahono, Djoko Legono, Istiarto, B. Yulistiyanto, Tugiyono77
- 10.**DESAIN SENSOR LOG-SPIRAL UNTUK MENDETEKSI PELUAHAN SEBAGIAN**
Herman H Sinaga ,Nining Purwasih.....88
11. **PENENTUAN PERIODE PENCAHAYAAN DAN PENAMBAHAN MOLASE OPTIMUM PADA KULTIVASI *MIXOTROPHIC Bottrio coccus braunii***
Muhammad Ahdan, Elida Purba103

12. PRETREATMENT FLY ASH BATUBARA (PFAB) DENGAN LARUTAN HCI SEBAGAI BAHAN BAKU PADA SINTESIS ZEOLIT	
Simparmin Br. Ginting, Indra Wibawa Dwi Sukma, Muhamad Fath Warganegara, Andika Wahyu Purnama, Diki Prayogo, Lisa Febriyanti.....	113
13. DESAIN PENGEMBANGAN ZONA WISATA TELUK KILUAN DAN ZONA WISATA BATU PUTU PROVINSI LAMPUNG	
Anggalia Wibasuri, Anuar Sanusi, Wahyu Kuntarti.....	121
14. RISET EVALUASI IMPLEMENTASI MISI : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BALAI BESAR POM LAMPUNG TAHUN 2013	
Bangun Suharti.....	140
15. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA BESAR BANDAR LAMPUNG	
Damanhuri, WN	150
16. PENINGKATAN KINERJA DOSEN MELALUI MOTIVASI, KEPEMIMPINAN, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL	
Delli Maria.....	156
17. STRATEGI MENYIASATI BONUS GEOGRAFIS DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN ASSET PARIWISATA DAERAH LAMPUNG BARAT	
Hesti Widi Astuti, Nani Soetarmiyati, Herlina.....	169
18. PEMETAAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	
Ikram	180
19. EKSPLORASI PENGETAHUAN, NILAI SIMBOLIS, DAN IDENTITAS ETNIS PRODUSEN-KONSUMEN PRODUK KAIN TAPIS	
Ismail Saleh Marsuki, Ahmad Rifai, Suprihatin Ali.....	195
20. ANALISIS DAERAH RAWAN BENCANA SOSIAL DI KABUPATEN TANGGAMUS	
Hartoyo	209
21. PENGARUH LATIHAN DAN PEMULIHAN TERHADAP PENINGKATAN VO2 MAX	
Marta Dinata.....	220
22. ANALISIS DAMPAK PENERAPAN MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 TERHADAP KUALITAS PELAYANAN AKADEMIK PERGURUAN TINGGI DI BANDAR LAMPUNG	
Muhammad Rafiq	225
23. PEMODELAN VARIABEL LOYALITAS DAN <i>WORD OF MOUTH</i> KONSUMEN YANG DIPENGARUHI SUASANA PELAYANAN, INTERAKSI, DAN KEPUASAN	
Suprihatin Ali.....	235

24. INTELLECTUAL CAPITAL DALAM MEMEDIASI HUBUNGAN ANTARA NILAI PASAR TERHADAP KINERJA KEUANGAN	
Susanti.....	256
25. Penegakan Hukum Integral Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Lampung	
Erna Dewi.....	273
26. NUWA DAN PERUBAHANNYA(Studi Etno-Teknologi dan Arsitektur Tradisional Rumah Adat Lampung)	
BartovenVivitNuridin, Yuni Ratnasari, Bintang Wirawan, Sulis Tyawan	293
27. DIVERSIFIKASI TERHADAP RISIKO DAN KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA	
Winda Rika Lestari, Novita Sari.....	304
28. ANALISIS HABITAT KUKANG SUMATERA (<i>Nycticebus coucang</i> Boddaert, 1785) PELEPASLIARAN YIARI DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BATUTEKI BLOK KALI JERNIH TANGGAMUS LAMPUNG	
Dimas Djuli Handoko, Jani Master, Indah Winarti.....	322
29. Morphology, Thermal Stability, Functional Group of Wood Flour and Rice Bran as Filler Applied with Poly Lactic Acid Film	
Edwin Azwar.....	336
30. PERILAKU KUKANG SUMATERA(<i>Nycticebus coucang</i> Boddaert, 1785) PELEPAS LIARAN YIARI DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BATUTEKI BLOK KALI JERNIH TANGGAMUS LAMPUNG	
Elga Octavianata, Jani Master, Richard Stephen Moore	346
31. PENGARUH KONSENTRASI <i>PLASTICIZER</i> PEG-400 DAN ASAM PALMITAT DAN TEMPERATUR PENDINGINAN TERHADAP SIFAT FISIK DANMEKANIK DALAM PEMBUATAN BIOPLASTIK	
Juni Kartika Permatasari dan Yuli Darni.....	355
32. Kandungan Klorofil Daun Planlet Tomat (<i>Lycopersicume sculentum</i> Mill) Hasil Seleksi dengan Asam Salisilat Secara <i>In vitro</i>	
Lindawati ,Endang Nurcahyani, dan Zulkifli.....	370
33. REGENERASI GENERATIF MANTANGAN (<i>Merremia peltata</i>) DI TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN	
MuklisIrfani ,Jani Master , Yulianty, Elly L. Rustiati , Atok Subiakto.....	380
34. Menentukan Kondisi Reservoar SerpihMinyak Berdasarkan Analisis SEM dan XRD Pada Karbonat dan Sandstone	
Ordas Dewanto, Bambang Soegijono, Edie Sasito Sarwodidoyo.....	389

- 35. Kandungan Klorofil Planlet Cabai Merah (*Capsicum annum* L) Hasil Seleksi dengan Asam Salisilat Secara *in vitro***
Rita Asmara401
- 36. PERANCANGAN POMPA TANPA MOTOR (*HYDRAM PUMP*) UNTUK SISTEM IRIGASI PERSAWAHAN MASYARAKAT DI DESA WONODADI UTARA**
Jorfri B. Sinaga, Ahmad Suudi, Sugiman415

ANALISIS DAERAH RAWAN BENCANA SOSIAL DI KABUPATEN TANGGAMUS

Hartoyo

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung

Abstrak

Penelitian ini secara khusus bertujuan menjelaskan daerah rawan bencana sosial di Kabupaten Tanggamus, selama lima tahun terakhir (2010-2014). Secara rinci menjelaskan konflik potensial dan terbuka, karakteristiknya, upaya penyelesaian, aktor yang terlibat dalam perdamaian, dan potensi membangun perdamaian. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Sumber datanya adalah Dinas Sosial, Kantor Kesbang Linmas, Kodim, Polres, Tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, LSM, Taruna Siaga Bencana; dan saksi/korban dan warga masyarakat terlibat konflik. Hasil penelitian menemukan bahwa, *pertama*, masyarakat di Kabupaten Tanggamus rawan terhadap bencana sosial, terutama dipengaruhi oleh faktor ideologi (agama, kepercayaan), ekonomi dan sosial-budaya. *Kedua*, konflik sosial ada yang vertikal dan horizontal, ada yang bersifat spontan dan ada yang terorganisir. *Ketiga*, kepentingan ekonomi sebagai infrastruktur konflik, sedangkan ideologi dan sosial-budaya sebagai faktor pendukungnya. *Keempat*, penyelesaian konflik sosial cenderung mengutamakan cara mediasi. *Kelima*, sinergi antar aktor (*multistakeholder*) dengan memanfaatkan nilai-nilai lokal dapat mempercepat dan memperkuat penyelesaian damai. *Keenam*, membangun perdamaian ke depan dapat dikembangkan dengan melibatkan *multistakeholder* secara sinergis dan dengan melakukan revitalisasi kelembagaan dan kearifan lokal.

Kata Kunci: bencana sosial, konflik sosial, perdamaian, penanganan konflik.

PENDAHULUAN

Masyarakat Lampung adalah majemuk terdiri atas beragam kelompok etnik dan agama. Karakteristik dasarnya adalah tersegmentasi, memiliki struktur sosial beragam, kurang dapat mengembangkan pikiran bersama, sering terjadi konflik, terintegrasi secara paksa, saling mendominasi, dan dalam pergaulan hidup sehari-hari tidak terdapat referensi nilai budaya dominan (Brunner, 1974, Aloysius, 1994, Koentjaraningrat, 1986, Berge dalam Nasikun, 1991, Hartoyo, 1996, 2010).

Sebagai daerah yang rawan bencana sosial, terbukti dalam dinamika kemajemukan masyarakat Lampung banyak diwarnai konflik-konflik kekerasan baik vertikal maupun horizontal. Dalam empat tahun terakhir Lampung merupakan salah satu provinsi yang mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sorotan tersebut muncul karena sering terjadi konflik kekerasan dengan tingkat eskalasi dan intensitas yang cukup tinggi.

Kondisi tersebut perlu “diantisipasi sejak dini”, perlu dikelola dengan baik sehingga berada pada kondisi harmonis berkelanjutan. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu wujud

konstelasi kehidupan ideal yang diharapkan bersama, dan bagaimana masyarakat mengelola dinamika kehidupannya. Aspek pertama berkaitan dengan tatanan sosial yang diinginkan, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan kehandalan strategi dan mekanisme pengelolaannya.

Data mutakhir dari Polda Lampung (2012) menunjukkan bahwa terdapat 108 titik rawan konflik sosial di Provinsi Lampung. Dari jumlah tersebut faktor penyebab paling besar adalah faktor poleksosbud 71,2 %, kemudian disusul faktor SARA 18,5 %, lalu faktor SDA 5,5 % dan faktor batas wilayah 4,6 %. Jika dilihat berdasarkan wilayah administratif, dari 15 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung semuanya memiliki titik rawan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa semua wilayah kabupaten dan kota tersebut sesungguhnya rentan terhadap bencana sosial.

Pemetaan konflik berdasarkan dimensi *sebab* berbasis wilayah di seluruh kabupaten dan kota oleh Polda Lampung telah memberikan informasi awal betapa intensitas konflik sosial di wilayah Provinsi Lampung cukup tinggi. Akan tetapi, gambaran yang lebih mendalam tentang daerah rawan bencana sosial dalam suatu wilayah Kabupaten dan Kota tertentu menjadi tidak terpenuhi.

Pendekatan kuantitatif memberikan gambaran secara umum, dangkal, berdasarkan jumlah, tetapi dapat mengidentifikasi konflik sosial di semua wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung. Kekurangannya adalah tidak mampu menjelaskan secara mendalam kondisi dan situasi rawan bencana sosial pada suatu daerah tertentu. Kekurangan tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini secara khusus bertujuan menggambarkan kondisi dan situasi daerah rawan bencana sosial di Kabupaten Tanggamus. Lingkup penjelasannya mencakup konflik potensial (*latent*) dan terbuka, karakteristiknya, upaya penyelesaian, aktor yang terlibat dalam perdamaian, dan potensi membangun perdamaian ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif analitik, yaitu menggambarkan realitas konflik sosial dan upaya perdamaian yang terdapat di suatu daerah, untuk kemudian dilakukan analisis. Dipilihnya Kabupaten Tanggamus sebagai lokasi penelitian karena diduga termasuk daerah rawan bencana sosial. Dasar pertimbangannya adalah konflik-konflik sosial pernah terjadi di wilayah ini dengan frekuensi dan intensitasnya cukup tinggi, jenis dan sumbernya yang beragam.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam. Observasi juga dilakukan untuk memperoleh data pelengkap terhadap obyek-obyek yang masih bisa diamati pada masa pascakonflik. Sumber datanya adalah: Dinas Sosial, Kantor Kesbang Linmas, Kodim, Polres, Tokoh masyarakat, LSM, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan saksi/korban dan warga masyarakat terlibat konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik-Konflik Sosial Potensial

Konflik-konflik potensial di wilayah Kabupaten Tanggamus dapat bersumber dari perbedaan nilai-nilai agama dan kepercayaan, faktor ekonomi, dan etnisitas.

1. Perbedaan nilai-nilai agama dan kepercayaan. Berkembangnya aliran keagamaan dan kepercayaan yang semakin beragam, dikhawatirkan ketika mereka melakukan perekrutan anggota (jamaah) baru, karena perbedaan faham dan tata cara beribadah, akan memicu konflik sosial. Beberapa di antaranya adalah: a. Kelompok Ikhwanul Muslimin yang kegiatannya berpusat di pekon Landbaw; b. Kelompok aliran Syi'ah di Pekon Tegalsari; c. Kelompok aliran yang mengatasnamakan Islam, ajarannya mangadopsi seni bela diri Merpati Putih dan Islam dengan tujuan sebagai pengobatan; d. Kelompok aliran kejawen di Pekon Gisting; e. Kelompok Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Binaan Tanggamus di wilayah Kecamatan Limau; dan f. Kelompok jamaah Ahmadiyah yang berpusat di Pekon Sukabumi.
2. Konflik potensial karena faktor ekonomi antara masyarakat setempat dengan perusahaan. *Pertama*, aktivitas PT. Sinar Intan Papua di Kecamatan Kota Agung Barat terkait penambangan batu dan aktivitas penambangan pasir di sungai semaka di Kecamatan Wonosobo, yang keduanya dikhawatirkan akan merusak lingkungan. *Kedua*, aktivitas penambangan PT. Naraung Mining di Register 28 Kecamatan Bandar Negeri Semoung berkaitan erat dengan penggantian lahan hutan kawasan, sengketa wilayah antara Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Lampung Barat, penyerapan tenaga kerja warga masyarakat sekitar yang belum maksimal, dan kemungkinan munculnya kecemburuan sosial. *Ketiga*, aktivitas Pertamina Geo Thermal Industry memiliki masalah perekrutan tenaga kerja, pembuatan limbah industri yang belum sesuai dengan tuntutan masyarakat karena limbah tersebut sudah masuk di areal pertanian/sawah masyarakat sekitar. *Keempat*, Sengketa tanah HGU seluas 850 hektar milik PT. Tanggamus Indah di Kecamatan Kota Agung Timur dengan masyarakat penggarap.
3. Konflik potensial karena faktor ekonomi antara masyarakat setempat dengan pemerintah. Di wilayah Register 25 Pematang Panggang Kecamatan Kelumbayan, Register 31 Pematang Arah Kecamatan Semaka, di Register 32 Bukit Rindingan Kecamatan Pulau Panggung, di Register 26 Serkung Peji Kecamatan Kelumbayan, di Register 27 Pematang Sulah Kecamatan Cukuh Balak, di Register 28 Pematang Neba Kecamatan Kota Agung Timur, Talang Padang, Pugung, dan Cukuh Balak, di Register 30 Gunung Tanggamus Kecamatan Kota Agung, Wonosobo, dan Ulu Belu, dan di Register 39 Kota Agung Utara Kecamatan Pulau Panggung, semua telah terjadi perambahan hutan oleh warga masyarakat untuk berkebun. Rencana reboisasi oleh Departemen Kehutanan akan berakibat pada hilangnya lahan garapan dan lapangan pekerjaan warga masyarakat perambah, sehingga situasi ini dapat menyebabkan terajadinya konflik dengan masyarakat setempat.
4. Konflik potensial karena faktor psikososial dan perbedaan eknik. Di wilayah Kecamatan Bandar Negeri Semoung (Pekon Banding, Antar Lebar), Kecamatan Semaka, dan Kecamatan Wonosobo rawan pembegalan dan pemalakan terhadap masyarakat luar bukan suku Lampung yang melintas di kawasan ini. Mereka sering menjadi korban pemalakan dan pembegalan oleh kelompok pemuda yang mayoritas suku Lampung.

Aparat keamanan dan aparat Pekon setempat masih kurang peduli terhadap kejadian tersebut, serta terhadap pelaku tindak kriminal. Karena silidaritas dan ikatan kesukuan masyarakat masih kuat, didukung oleh sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan penerangan jalan yang kurang baik (karena berada di wilayah terpencil) maka situasi ini jika dibiarkan berlarut-larut akan mengkristal (akumulatif) dan akan menyebabkan sikap enggan melapor dan menyembunyikan pelaku kejahatan.

Konflik-Konflik Sosial Terbuka

Terdapat variasi latar belakang terjadi konflik-konflik sosial di Kabupaten Tanggamus. Pada satu kasus bersumber dari faktor sosial, dan pada kasus yang lain bersumber dari faktor nilai-nilai dan faktor ekonomi.

1. Rencana pembangunan Kawasan Industri Maritim (KIM).

Rencana pembangunan KIM tersebut berada di atas tanah milik PT. Pertamina seluas 1.022 hektar di Pekon Suka Banjar Kecamatan Kota Agung Timur dan Pekon Batu Balai Kecamatan Limau. Tanah tersebut sejak tahun 1973 sudah dihuni dan digunakan oleh masyarakat untuk permukiman, sawah dan kebun, dan pada saat ini sudah ada sebanyak 250 KK yang tinggal di kawasan tersebut. Tanah tersebut sudah banyak yang berubah menjadi hak milik (bersertifikat) dan juga dijualbelikan. Kemudian tanah tersebut akan digunakan sebagai Kawasan Industri Maritim, untuk dok kapal, dan untuk perkebunan PT. Rapindo, dan dihibahkan kepada pemerintah Tanggamus. Atas kejadian tersebut, masyarakat setempat melakukan desakan dan tuntutan ganti rugi rumah, tanah dan kebun kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Masyarakat menyadari hanya menuntut ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan, akan tetapi Pemda Tanggamus hanya menyanggupi uang kompensasi kepada warga untuk pindah. Tuntutan ganti rugi yang tidak dipenuhi dapat menyebabkan terjadinya eskalasi konflik.

Pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2013, sekitar pukul 12.00-12.30 WIB, di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tanggamus telah berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan sekitar 20 orang massa dan Petani Batu Balai Bersatu (PBB) Kabupaten Tanggamus. Mereka menuntut agar Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat menunjukkan surat kontrak sewa PT. Rapino Jagat Raya dengan PT. Pertamina dan menjelaskan rumusan besaran uang Tali Asih dengan nilai sebesar Rp 6.500.000/Ha., untuk lahan yang digunakan sebagai Kawasan Industri Maritim (KIM) Batu Balai Kota Agung.

Pada hari Rabu Tanggal 5 Juni 2013, sekitar Pukul 09.55-12.30 WIB kembali dilakukan unjuk rasa di Kantor Pemda Kabupaten Tanggamus telah berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekitar 200 orang massa. Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013, sekitar pukul 13.00-15.30 WIB di Dusun Curup, Pekon Ketapang, Kecamatan Limau telah berlangsung rapat Ormas PBB.

Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 08.15-19.00 WIB di Pekon Ketapang Kecamatan Linau telah berlangsung aksi penghentian alat berat milik PT. Rapindo Jagad Raya yang akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan Kawasan Industri Maritim (KIM) Batu Balai oleh Ormas PBB.

Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00-11.30 WIB di Pengadilan Negeri Kota Agung telah berlangsung sidang perdata dengan penggugat LSM Petani Batu Balai Bersatu (PBB) sebagai tindakan melawan hukum dan pihak-pihak yang tergugat adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus, PT. Rapindo Jagat Raya, PT. Pertamina Persero, dan Badan Pertanahan Nasional Tanggamus. Sampai saat ini permasalahan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

2. Aksi penutupan jalan desa.

Pada tahun 2013 terjadi konflik antara CV. Tanjung Kemala Raya dengan warga masyarakat sekitar (pemilik tanah). Warga masyarakat melakukan aksi penutupan jalan dengan membuat patok dan portal. Aksi ini dipicu oleh keberatan warga jika jalan tersebut dilalui kendaraan/alat berat milik perusahaan dan tidak ada koordinasi dengan Endri sebagai pemilik tanah. Jalan tersebut adalah jalan umum milik desa dan warga masyarakat sekitar khawatir jalan rusak dan warga masyarakat tidak bisa melewatinya.

Permasalahan yang mungkin timbul adalah terjadi keributan antara kelompok-kelompok tertentu (dan warga masyarakat) dengan perusahaan dan pihak pengamanan perusahaan (anggota TNI-AL), dikhawatirkan terjadi tindak perusakan dan pencurian aset perusahaan.

3. Konflik antar kelompok nelayan

Pada tahun 2013, para nelayan moderen yang menggunakan jaring/pukat pusing (*curshing*) di sekitar perairan kelumbayan dianggap sebagai penyebab menurunya hasil tangkapan ikan nelayan tradisional "Obor". Kondisi ini memicu kelompok nelayan OBOR melakukan protes keras terhadap keberadaan nelayan moderen. Sampai saat ini masalah tersebut sudah terselesaikan dengan melakukan musyawarah dengan melibatkan pemuka masyarakat, pihak berkonflik dan aparat pemerintah daerah setempat.

4. Konflik antar kelompok warga benuansa etnik

Pada hari Rabu sampai Kamis tanggal 30-31 Juli 2014 telah terjadi konflik antar kelompok masyarakat benuansa etnik di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Konflik bermula saat Syahyani (30) warga suku Lampung, warga Pekon Karang Agung, Kecamatan Semaka, bersama rekannya diduga mencuri sepeda motor di sebuah masjid di Pekon Tugu Papak saat Salat Maghrib. Syahyani kemudian tertangkap dan dihakimi hingga tewas di Pekon Sukaraja (dari suku Jawa), sedangkan yang seorang rekannya berhasil kabur.

Pada saat yang bersamaan, Reval (suku Lampung), warga Pardawaras, melintas di sekitar lokasi kejadian sambil menuntun motor. Warga menduga bahwa dia adalah rekan Syahyani yang kabur. Massa warga masyarakat setempat dari suku Jawa langsung memukulinya. Padahal, sebenarnya antara Reval dan Syahyani tidak ada hubungannya.

Namun, emosi warga yang sudah memuncak akhirnya berujung amukan terhadapnya. Tindakan warga masyarakat suku Jawa ini yang kemudian menyulut penyerbuan warga suku Lampung ke Pekon Sukaraja (dari suku Jawa) yang datang dari beberapa pekon di Kecamatan Semaka. Mereka tidak terima terhadap tindakan warga Sukaraja yang memukuli Reval. Di dalam proses penyerangan tersebut diduga ada provokator yang sengaja menghembuskan isu etnis untuk menyulut emosi warga sejumlah pekon.

Akhirnya, dalam waktu sekejap seribuan orang terkumpul dan menyerbu Pekon Sukaraja sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu, mereka hanya menyerbu rumah milik Japan, warga Pekon Sukaraja, karena Syahyani dan Reva dihajar beramai-ramai di halaman rumah tersebut. Aksi anarkis tidak dapat dibendung sampai terjadi pembakaran terhadap rumah Japan. Massa yang menyerang Pekon Sukaraja terus berdatangan. Bertambahnya jumlah warga akhirnya melebarkan persoalan. Aksi pengrusakan rumah warga Pekon Sukaraja terjadi hingga tiga kali. Aksi pertama pukul 19.00 WIB, aksi kedua pukul 21.00 WIB, dan aksi ketiga pada hari Kamis pukul 02.00 WIB.

Akibat dari kejadian tersebut kerugian warga Pekon Sukaraja ditaksir sebesar sekitar Rp 1,5 miliar. Terdapat tujuh rumah rusak parah, tiga rumah rusak ringan, tiga mobil, dan empat motor terbakar di Pekon Sukaraja. Selain itu juga terjadi penjarahan harta benda yang dilakukan oleh para penyerang.

Proses penyelesaian konflik sosial dilakukan dengan cara mediasi. Proses mediasi dilakukan di Kecamatan Semaka dan dihadiri oleh Camat, Danrem 043 Lampung, Kapolres Tanggamus, Asisten I Bupati Tanggamus, Dandim 0424 Tanggamus, semua Kepala pekon di Kecamatan Semaka, juga seluruh kelapa pekon. Dari hasil pertemuan dihasilkan 6 (enam) kesepakatan damai sebagai berikut: 1) seluruh warga pekon sepakat tidak bertindak sendiri dalam melakukan tindak anarkis; 2) jika terjadi aksi kriminal tidak main hakim sendiri; 3) mengimbau warga tidak terpancing terhadap aksi sukuisme dan rasisme; 4) seluruh tokoh dan aparat pekon mengupayakan kepada warganya agar melaksanakan kesepakatan ini (damai); 5) menyerahkan sepenuhnya pengusutan masalah ini kepada kepolisian; 6) seluruh warga agar tidak saling dendam satu sama lain dan saling memaafkan.

Karakteristik Konflik Sosial

Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Tanggamus secara umum karena persaingan penguasaan sumberdaya alam dan ekonomi, eksklusivitas pemukiman dan etnosentrisme, dan lemahnya tindakan aparat keamanan dalam menindak tegas para pelaku kejahatan. Disamping itu juga terjadi akumulasi konflik dan tidak pernah dapat diselesaikan secara tuntas. Segregasi etnik, persaingan akses sumberdaya ekonomi dan tanah, dan perbedaan nilai-nilai budaya dan agama dapat menjadi sumber konflik.

Konflik-konflik sosial yang terjadi, *pertama*, bersumber pada konflik horizontal antara warga masyarakat, dan konflik vertikal antara warga masyarakat setempat dengan pemerintah dan perusahaan. Konflik sosial horizontal cenderung bersifat ekspresif dan spontan, sedangkan konflik konflik sosial vertikal cenderung bersifat instrumental dan terorganisir. *Kedua*, karena kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak partisipatif. *Ketiga*, konflik antara masyarakat

dengan perusahaan, karena tidak terjadi kesepakatan pemberian ganti kerugian secara layak. *Keempat*, konflik dalam perebutan sumberdaya laut yang tidak cepat diantisipasi sebelumnya oleh Pemerintah Daerah dan aparat keamanan. *Kelima*, konflik akibat main hakim sendiri terhadap tindak kejahatan oleh warga dari kelompok tertentu terhadap warga dari kelompok lain.

1. Konflik Faktor Ideologi

Potensi konflik ideologi agama di Kabupaten Tanggamus cukup tinggi, yaitu antar kelompok warga pemeluk agama yang sama dengan aliran yang berbeda dan antar kelompok warga pemeluk agama yang berbeda.

Realitas menunjukkan bahwa berbagai aktivitas yang secara nyata dapat mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama adalah penghinaan terhadap agama lain, salah faham, mengganggu kegiatan peribadatan, menonjolkan identitas keagamaan, lemahnya koordinasi, sikap eksklusifisme, diskriminasi, perijinan pendirian tempat ibadah, fanatisme beragama secara sempit, munculnya aliran baru yang dianggap sesat, dan kesadaran hukum.

2. Konflik Faktor Ekonomi

Konflik berdasarkan faktor ekonomi ini yang paling banyak terjadi, baik pada konflik potensial maupun pada konflik terbuka. Pada suatu kondisi tertentu, letupan konflik dalam ruang atau dimensi ekonomi menjadi tidak terhindarkan, bahkan dalam konflik kekerasan dan destruktif. Konflik-konflik faktor ekonomi ini juga dapat berkembang dalam konflik vertikal dan horizontal. Seperti ketika konflik yang tadinya murni karena berebut sumberdaya ekonomi kemudian berhimpitan dengan akumulasi stereotipe dan prasangka etnik, dapat cepat meluas dan tindakannya bisa menjadi lebih keras.

Jika dilihat dalam kerangka struktural, jumlah penduduk di kabupaten Tanggamus semakin meningkat; terjadi pemekaran wilayah pemerintahan tingkat Kecamatan dan Pekon, Kecamatan, dan jumlah perusahaan juga semakin banyak. Semua membutuhkan tanah untuk permukiman, bangunan, jalan dan juga sebagai sumber kehidupan, sehingga mempengaruhi nilai tanah. Situasi perebutan tanah merupakan perwujudan dari konflik potensial dan rentan terhadap munculnya beragam konflik pertanahan.

Banyak konflik sosial yang berawal dari sengketa tanah, hal ini antara lain disebabkan lemahnya alas hak dan batas-batas yang tidak jelas. Pemerintah daerah belum optimal dalam menyelesaikan konflik-konflik yang didasarkan pada faktor ekonomi. Kesenjangan ekonomi dan akses terhadap sumberdaya ekonomi sering menjadi sebab terjadi gesekan dari masalah yang kecil menjadi besar dan meluas.

3. Konflik Faktor Sosial-Budaya

Konflik-konflik yang terjadi bersumber dari faktor sosial-budaya biasanya bersifat spontan dan dalam bentuk amuk massa. Konflik-konflik seperti ini sering terjadi dengan tindak kekerasan, sehingga memakan korban jiwa dan kerugian harta benda. Konflik faktor sosial-budaya, seperti psikososial, penting diwaspadai karena mudah berimpit dengan faktor-faktor lainnya.

Konflik bernuansa etnik terjadi dalam bentuk kekerasan ketika berhimpitan dengan kepentingan ekonomi. Berakar pada perebutan sumberdaya ekonomi, dapat mengembangkan sentimen dan stereotip etnik, serta pandangan subordinasi antar kelompok. Pada situasi nyata dapat berkembang tindakan-tindakan diskriminasi, kurang menghargai pluralisme, dan 'adu kekuatan' melalui berbagai upaya untuk menciptakan dominasi. Etnosentrisme tidak akan menimbulkan konflik tanpa didukung oleh anggapan yang berlebihan tentang nilai-nilai budaya yang dianutnya. Klaim berlebihan secara absolut dan pengakuan terhadap identitas etnik tertentu yang melekat dalam masyarakat majemuk dapat menjadi sebab munculnya konflik. Peluang konflik akan lebih besar jika klaim-klaim itu berhimpitan dengan faktor psikososial dan ekonomi.

Konflik-konflik sosial bernuansa etnik juga banyak yang dipicu oleh tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota etnik tertentu dan main hakim sendiri yang dilakukan oleh kelompok etnik lain. Ketika, yang diduga penjahat itu tertangkap kemudian terjadi amuk massa sampai menimbulkan korban luka atau bahkan meninggal dunia, maka situasi ini mudah berkembang menjadi konflik yang bernuansa etnik yang disertai dengan kekerasan.

Konflik Sosial dan Penyelesaiannya

Pada umumnya konflik terjadi karena perebutan sumberdaya yang tidak mampu diantisipasi dengan baik. Dampaknya sangat besar, yaitu terjadi korban jiwa, kehilangan harta benda, dan trauma berkepanjangan. Konflik-konflik terjadi dapat karena persaingan dalam berbagai sektor, khususnya dalam akses sumberdaya alam dan ekonomi. Konflik sosial dapat terjadi karena eksklusivitas pemukiman, perbedaan adat istiadat, aktivitas keagamaan, rendahnya toleransi dan akulturasi, renggangnya kerjasama dan kehidupan bersama, kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial, dan tindakan main hakim sendiri.

Kondisi dan situasi tersebut sudah memproduksi bibit-bibit permusuhan, sehingga apabila hadir faktor pemicunya mudah membangkitkan emosi dan terjadi amuk massa. Masing-masing pihak tidak saling memahami satu sama lain. Nilai-nilai lokal saling meminggirkan, anti sosial dan cenderung tertutup oleh ego kelompok. Pemaknaan nilai-nilai lokal sudah mengalami pergeseran, sehingga tidak mampu bekerja secara efektif (fungsional) dalam menjaga dan membangun perdamaian.

Penyelesaian konflik sosial cenderung mengutamakan mekanisme tradisional, yaitu mengutamakan keterlibatan para pihak berkonflik yang dimediasi oleh aparat Polri dan TNI, dan para pejabat pemerintah daerah yang ditunjuk dan berwenang dalam menyelesaikan konflik. Ada kasus konflik sosial yang terdapat unsur tindak pidana tetap diproses secara hukum. Tetapi ada kasus konflik sosial yang bernuansa etnik, meskipun ada unsur pidananya, berdasarkan kesepakatan bersama para pihak hanya diselesaikan secara tradisional, tidak diproses secara hukum.

Secara umum penanganan konflik sosial melalui mekanisme sosiokultural masih lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem deteksi dini (*early warning systems*) masyarakat masih lemah. Bukan berarti bahwa konflik-konflik sosial yang sudah didamaikan itu sudah dianggap selesai, melainkan masih tersisa perasaan negatif satu sama lain, dan belum sembuh benar dari trauma dan berbagai perasaan negatif lainnya akibat konflik.

Timbul kembali konflik-konflik kekerasan, selain masih lemahnya sistem deteksi dini juga masih lemahnya sistem respon dini (*early respon systems*). Pada satu sisi, konflik sosial yang terjadi secara berulang karena penyelesaiannya menggunakan pendekatan yang dianggap menguntungkan diri mereka masing-masing. Masing-masing pihak ingin memperoleh kemenangan, sedangkan yang lain harus dikalahkan. Penyelesaian ini tidak berlangsung lama, karena ketika pihak lawan merasa kuat maka perlawanan akan dilakukan lagi.

Konflik-konflik yang terjadi sebelumnya dapat diselesaikan dengan cara damai tetapi sebenarnya bersifat semu, karena pihak yang lemah merasa mendapat tekanan dari pihak yang kuat, ketika terjadi konflik kembali terbuka peluang berkembang menjadi konflik kekerasan. Dalam konflik agraria terdapat beberapa kasus yang mana pihak yang satu tetap menggunakan mekanisme non litigasi (mediasi), sedangkan pihak yang lain tetap menggunakan jalur hukum.

Paran Para Aktor Perdamaian dan Kearifan Lokal

Keterlibatan para aktor dalam membangun perdamaian sudah cukup baik, dan masih perlu ditingkatkan. Aktor-aktor perdamaian yang memiliki relevansi terhadap upaya membangun perdamaian adalah tokoh masyarakat, aparat pemerintah, aparat keamanan (TNI, Polri); LSM, Perguruan Tinggi, Media massa, Ormas, FKUB; Tagana, dan pihak swasta.

Untuk mendukung aktor-aktor penggiat perdamaian perlu merevitalisasi nilai-nilai, pengetahuan, dan kearifan lokal, seperti nilai harga diri, toleransi, persaudaraan, gotong-royong, tolong-menolong, saling menghargai dan menghormati. Nilai-nilai dasar tersebut perlu dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perilaku hidup damai perlu terus dijaga, dipelihara dan dikembangkan secara arif sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat luar dan masyarakat setempat.

Jika dilihat dari tahapan membangun perdamaian, yaitu *pre-emptive*, *prefentif*, dan penegakan hukum, maka peran para aktor perdamaian masih terkonsentrasi pada penegakan hukum dibandingkan peran mereka pada aspek yang lainnya. Sistem koordinasi antar berbagai pihak masih lemah terutama dalam aspek *preemptive* dan *preventive*. Oleh karena itu, penguatan pada kedua aspek tersebut sangat diperlukan dalam membangun perdamaian secara menyeluruh (*peace building*) di masa yang akan datang.

Dalam beberapa kasus perdamaian pascakonflik, aparat keamanan sering hadir. Namun demikian, peran dalam penyelesaian konflik dan tindak kejahatan di dalam masyarakat belum cukup, selain masih perlu ketegasan dalam menerapkan hukum parannya dalam situasi prakonflik juga penting. Sistem intelijen yang memadai, sistem kontrol terhadap dinamika kelompok, tingkat kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat berpengaruh terhadap kualitas deteksi dini terhadap setiap konflik yang mungkin muncul dapat segera dikendalikan.

Potensi Membangun Perdamaian

Konflik-konflik sosial potensial dan aktual di wilayah Kabupaten Tanggamus adalah beragam, baik dilihat dari bentuknya (vertikal maupun horizontal) maupun sumbernya (faktor ekonomi, ideologi atau agama, etnik, dan psikososial). Penyelesaian konflik ada yang sudah tuntas dan ada yang masih tersisa, dengan melibatkan semua stakeholder. Namun demikian, potensi membangun perdamaian dapat dilakukan sejauh konflik-konflik sosial tersebut selalu dalam pengawasan dan pengendalian.

Pertama, membangun atau memperkuat kembali nilai-nilai lokal yang terkandung dalam falsafah hidup masing masing kelompok sosial dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda yang sudah mengalami pendangkalan. Contohnya, nilai-nilai dasar *Pi-il Pesenggiri* dalam kehidupan masyarakat adat Lampung. Nilai-nilai tersebut semakin memudar, sehingga perlu dikuatkan kembali.

Kedua, membentuk forum komunikasi lintas budaya dan agama sangat diperlukan dengan tujuan untuk saling memahami, beradaptasi, saling menghormati dan toleran atas segala perbedaan. Forum komunikasi ini diharapkan dapat dibentuk dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat, bukan merupakan program intervensi yang tergantung dari pihak luar. Meskipun demikian dukungan dari pihak luar sangat diperlukan untuk memperkuat keberdayaan masyarakat.

Ketiga, mengembangkan berbagai kegiatan positif bagi warga masyarakat, terutama pada kalangan pemuda yang mengarah pada upaya membangun perdamaian. Dalam banyak kasus konflik sosial diawali oleh tindakan para pemuda yang kemudian menjadi konflik antar kelompok yang lebih luas.

Keempat, penegakan hukum yang berkeadilan dan kebijakan pemerintah daerah yang mensejahterakan semua pihak adalah penting dalam memperkuat, mengembangkan dan memelihara perdamaian. Perdamaian lebih sulit dilakukan justru pada konflik potensial dan terbuka yang bersifat vertikal, khususnya yang berdasarkan faktor ekonomi antara warga masyarakat dengan perusahaan. Masyarakat menekankan pada mekanisme tradisional melalui mediasi, sedangkan perusahaan menekankan pada mekanisme rasional melalui jalur hukum. Keduanya sulit mencapai titik temu, sehingga perdamaian yang belum selesai di wilayah tertentu sudah terjadi konflik lagi di wilayah lain.

Kelima, memperbanyak kegiatan penunjang seperti program keserasian sosial, pembentukan pemuda pelopor perdamaian dan program-program bantuan dari berbagai pihak. Terutama program-program pembangunan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat berbasis pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Proses perdamaian secara menyeluruh (*peace building*) perlu dilakukan pascakonflik, terutama dalam mengatasi akar persoalan ideologi, ekonomi dan sosial-budaya.

KESIMPULAN

Masyarakat di Kabupaten Tanggamus rawan terhadap bencana sosial yang didasari oleh faktor ideologi (agama, kepercayaan), ekonomi dan sosial-budaya. Konflik potensial dan

aktual yang bersumber pada faktor ekonomi (khususnya tanah) adalah yang dominan. Hal ini terjadi, *pertama*, karena kebijakan pembangunan, khususnya kebijakan pertanahan yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. *Kedua*, karena terjadi perubahan nilai tanah akibat bertambahnya jumlah penduduk, perluasan lembaga pemerintahan, dan berkembangnya perusahaan yang semua memerlukan tanah.

Konflik terjadi secara vertikal dan horizontal. Konflik vertikal lebih terorganisir, sedangkan konflik horizontal bersifat spontan dan dalam bentuk amuk massa. Konflik horizontal lebih mudah dan lebih cepat diselesaikan daripada konflik vertikal. Kepentingan ekonomi lebih dominan sebagai faktor yang mendasari konflik sosial (infrastruktur konflik), kemudian faktor ideologi (agama, kepercayaan) dan sosial-budaya sebagai pendukungnya. Penyelesaian konflik cenderung mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai mufakat melalui mediasi yang difasilitasi oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat.

Konflik-konflik sosial yang mungkin terjadi pada masa mendatang dalam beragam bentuk, frekuensi, intensitas dan eskalasinya, bersumber dari dan dipicu oleh beragam faktor. Kemungkinan didasarkan pada banyak kasus konflik yang terjadi sebelumnya, baik konflik horizontal maupun vertikal. Konflik-konflik sosial dapat terjadi dari faktor hubungan psikososial, kepentingan ekonomi, perbedaan nilai-nilai (agama dan etnisitas), dan faktor kesenjangan struktural. Oleh karena itu sinergi antar aktor (*multistakeholder*) dengan memanfaatkan nilai-nilai lokal dapat mempercepat dan memperkuat penyelesaian damai dan membangun perdamaian ke depan dapat dikembangkan dengan melibatkan multistakeholder secara sinergis dan dengan melakukan revitalisasi kelembagaan dan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius, Livery. 1994. *Prasangka Sosial dan Efektivitas Komunikasi Antaretnik: Studi tentang pengaruh prasangka sosial terhadap efektivitas komunikasi antaretnik para warga kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Bandung: Program Pascasarjana Univ. Padjadjaran. Disertasi.
- Brunner, E.M. 1974. *The Expression of The Ethnic Group in Indonesia*. Abnen Cohen (ed.) ASA Monograph: Tavistock.
- Hartoyo, 1996. *Keserasian Hubungan Antar Etnik, Faktor Pendorong dan Pengelolaannya: Studi di Kelurahan Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Tesis
- Koentjaraningrat. 1988. *Lima Masalah Integrasi Nasional*. Dalam: *Masalah – masalah Pembanguna: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- Nasikun. 1991. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali Pers.